

Pendidikan Pancasila sebagai wahana Pendidikan Politik di organisasi kesiswaan

Dhea Marchelia, *Al Rafni, Suryanef, Hasrul
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: ***Al Rafni**
E-mail: alrafni@fis.unp.ac.id

Abstract

Pancasila Education plays a strategic role as a vehicle for political education in shaping democratic attitudes and enhancing student participation within the school environment. This study aims to analyze how Pancasila Education contributes to fostering democratic attitudes and student participation in school organizations, specifically the Student Council (OSIS) at SMAN 1 Batusangkar. The method used is a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and a preliminary survey of students active in the organization. The results of the study indicate that although students have understood the concept of democracy theoretically, its implementation in organizational activities remains suboptimal. This is evident from the dominance of the core executive members in decision-making, students' participation that tends to be passive, and members' involvement that is still limited to the implementation stage of activities. This situation indicates that democratic values have not yet been fully internalized in organizational practices. Therefore, more contextual learning innovations and evaluations that focus not only on cognitive aspects but also on affective and psychomotor aspects are needed so that Pancasila Education can function more effectively as political education.

Article History

Received: 12 April 2026

Accepted: 23 April 2026

Published: 24 April 2026

Keywords:

Pancasila education, political education, democratic attitudes, student participation

PENDAHULUAN

Pendidikan sangatlah penting untuk membentuk manusia Indonesia yang bermoral, beretika, dan menjadi warga negara yang baik. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Presiden Republik Indonesia, 2003), pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Potensi ini meliputi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan generasi yang berkualitas. Banyak individu yang memiliki kecerdasan, tetapi kurang memiliki hati nurani yang kuat. Oleh karena itu, pengembangan jati diri dan penanaman sikap positif pada individu harus dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, dan memperkuat kebiasaan-kebiasaan baik sehingga timbul keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik dalam diri siswa. Kebiasaan positif tersebut telah lama ditanamkan dan diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran oleh para pendidik. Namun yang paling penting adalah pembiasaan tersebut harus diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah, oleh para pendidik.

Sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman secara kognitif, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari (Winarno, 2013). Salah satu bentuk konkret dari penerapan nilai-nilai tersebut dapat dilihat melalui keterlibatan siswa dalam organisasi sekolah, seperti OSIS. Organisasi ini menjadi ruang belajar bagi siswa untuk mempraktikkan langsung nilai demokrasi, seperti musyawarah, kerja sama, dan tanggung jawab. Menurut Ditjen Dikti (2016) Makna pembelajaran pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kepada setiap warga negara untuk dapat bersikap dan berbuat kebaikan, meningkatkan moralitas bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Namun, berdasarkan hasil observasi awal di SMAN 1 Batusangkar, masih terdapat kesenjangan antara konsep yang diajarkan di kelas dengan praktik di lapangan. Dalam beberapa kegiatan organisasi, proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi. Misalnya, dalam rapat OSIS, meskipun musyawarah dilakukan, keputusan sering kali didominasi oleh pengurus inti, sementara anggota lain cenderung mengikuti tanpa banyak memberikan pendapat. Selain itu, partisipasi siswa dalam organisasi juga belum maksimal. Banyak siswa yang hanya hadir saat kegiatan berlangsung, tetapi tidak terlibat aktif dalam proses perencanaan maupun evaluasi. Bahkan, terdapat siswa yang tidak mengetahui secara jelas program kerja organisasi yang mereka ikuti. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi masih bersifat formalitas, belum didasari oleh kesadaran sebagai bagian dari organisasi.

Hasil wawancara dengan beberapa siswa juga memperkuat kondisi tersebut. Salah satu siswa menyatakan bahwa dalam rapat organisasi, mereka lebih memilih mengikuti keputusan ketua agar proses tidak berlarut-larut. Siswa lain juga mengungkapkan bahwa tidak semua anggota berani menyampaikan pendapat karena merasa kurang percaya diri.

Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana Pendidikan Pancasila benar-benar berfungsi sebagai pendidikan politik dalam membentuk sikap demokratis dan meningkatkan partisipasi siswa di lingkungan sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait peran Pendidikan Pancasila dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa (Sugiyono, 2019).

Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai Pendidikan Pancasila sebagai wahana pendidikan politik dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa di organisasi siswa di SMAN 1 Batusangkar. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan lapangan, foto, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Subjek penelitian terdiri dari Guru Pendidikan Pancasila yang mengetahui kondisi kelas dan mengajarkan Pendidikan Pancasila kepada siswa di kelas, siswa yang ikut dalam kegiatan organisasi di sekolah. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2022). Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam karena informan yang dipilih benar-benar memahami fenomena yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara berkelanjutan, baik selama maupun setelah pengumpulan data. Menurut Eko Haryono (2023), terdapat empat tahapan utama dalam analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara sistematis dan menghasilkan gambaran yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya ingin mengetahui tingkat partisipasi siswa, tetapi juga memahami secara mendalam proses, hambatan, serta pengalaman siswa dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi Pendidikan Pancasila sebagai wahana Pendidikan Politik dalam membangun sikap demokratis dan partisipatif siswa dalam organisasi kemahasiswaan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan survei awal yang dilakukan di SMAN 1 Batusangkar, diketahui bahwa siswa pada umumnya telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep dasar demokrasi yang diajarkan dalam Pendidikan Pancasila. Hal ini terlihat dari kemampuan siswa dalam menjelaskan pentingnya musyawarah, menghargai pendapat orang lain, serta tanggung jawab dalam organisasi. Namun demikian, pemahaman tersebut masih cenderung berada pada tataran kognitif dan belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku nyata siswa. Dalam beberapa kegiatan organisasi, terutama rapat OSIS, masih ditemukan siswa yang enggan menyampaikan pendapat karena kurang percaya diri atau merasa tidak perlu terlibat aktif dalam diskusi.

Materi Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis sebagai wahana pendidikan politik dalam membangun sikap demokratis dan meningkatkan partisipasi siswa dalam organisasi siswa. Materi yang disampaikan kepada siswa, seperti Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta

Pancasila sebagai pemersatu bangsa, memberikan landasan konseptual dan normatif bagi siswa dalam memahami kehidupan demokratis. Melalui materi tersebut, siswa dibimbing untuk memahami prinsip persamaan hak, kebebasan berpendapat, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan. Pemahaman ini menjadi bekal penting bagi siswa dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di lingkungan organisasi sekolah.

Lebih lanjut, materi Pendidikan Pancasila tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga dikontekstualisasikan dengan kehidupan siswa di sekolah, khususnya dalam kegiatan organisasi siswa. Siswa diarahkan untuk mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan praktik nyata, seperti keterlibatan dalam pemilihan pengurus organisasi secara demokratis, keaktifan dalam rapat dan musyawarah, serta kesediaan menerima dan menghargai pendapat orang lain. Proses pembelajaran tersebut mendorong tumbuhnya kesadaran politik siswa secara bertahap, di mana siswa tidak hanya memahami haknya untuk berpartisipasi, tetapi juga menyadari kewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil bersama.

Gambar 1. Siswa mengikuti pembelajaran di kelas



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa Guru Pendidikan Pancasila telah berupaya dalam memberikan materi yang sesuai dengan nilai demokrasi agar dapat diimplementasikan dalam kegiatan berorganisasi. Untuk mengungkap Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan politik dalam membangun sikap demokratis siswa, maka siswa diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam semua proses demokratis yang berlaku, termasuk debat terbuka, pencoblosan di bilik suara, dan kampanye. Melalui pembelajaran ini, siswa diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, menghargai perbedaan, musyawarah mufakat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (Setiawati et al., 2024)

Siswa tidak hanya mempelajari materi demokrasi di kelas tetapi juga mengalami praktik pemilihan di OSIS. Setelah mengikuti kegiatan, beberapa siswa merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk berorganisasi. Mereka juga belajar betapa pentingnya memilih program dan visi daripada popularitas Pancasila membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis, yang sangat diperlukan dalam era Revolusi Industri 4.0 dimana teknologi dan informasi berkembang dengan sangat cepat (Andrian Sinaga et al., 2024).

Sebagai wahana pendidikan politik, Pendidikan Pancasila berperan dalam membangun sikap demokratis siswa di sekolah. Melalui mata pelajaran ini, guru berupaya

menanamkan nilai-nilai demokrasi dengan menyisipkan berbagai aktivitas pembelajaran yang dapat membentuk sikap siswa, seperti pemberian motivasi, penanaman kesadaran akan pentingnya sikap demokratis, serta penguatan nilai tanggung jawab dan partisipasi. Pendidikan politik yang diperoleh siswa di sekolah tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sekolah, seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua organisasi siswa, serta kegiatan lain yang melatih siswa untuk bersikap aktif, kritis, berfikir maju, memahami pentingnya tanggung jawab, serta menyadari hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Dengan demikian, materi Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai sarana pembelajaran politik yang efektif di lingkungan sekolah. Melalui penguatan nilai demokrasi dan penerapannya dalam organisasi siswa, Pendidikan Pancasila berkontribusi dalam membentuk sikap demokratis, meningkatkan partisipasi aktif siswa, serta menyiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki kesadaran politik, berkarakter Pancasila, dan mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan demokratis, baik di lingkungan sekolah maupun di Masyarakat.

Strategi guru dalam mengajarkan Pendidikan Pancasila sebagai wahana Pendidikan Politik dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi dalam organisasi siswa

Strategi yang diterapkan guru dalam pembelajaran Pancasila di SMAN 1 Batusangkar memengaruhi pembentukan sikap demokratis dan partisipasi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik nyata melalui diskusi kelas, simulasi, serta keterlibatan siswa dalam kegiatan organisasi yang bersifat demokratis. Temuan ini relevan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual efektif dalam menerapkan nilai demokrasi kepada siswa. Menurut penelitian di SMAN 1 Batusangkar, strategi sekolah melalui kegiatan diskusi kelas, pemilihan, dan praktik demokrasi lain merupakan langkah implementasi nilai-nilai Pancasila yang efektif dalam pendidikan demokrasi, meskipun masih terdapat kendala berupa kurangnya keberanian siswa untuk aktif berpartisipasi yang memerlukan motivasi dan penguatan strategi lebih lanjut.

Strategi pembelajaran yang interaktif terbukti mempunyai dampak positif yang signifikan dalam membentuk sikap demokratis di antara siswa, selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran aktif dan partisipatif mampu memperdalam pemahaman siswa mengenai konsep demokrasi (Smith, 2015). Aktivitas seperti diskusi kelompok, debat, dan simulasi yang berkaitan dengan kegiatan demokratis tidak hanya membantu siswa memahami nilai-nilai demokrasi, tetapi juga melatih mereka dalam kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori Vygotsky mengenai pembelajaran sosial, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar (Vygotsky, 1978). Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran interaktif memiliki efek yang signifikan dalam membangun sikap demokratis di kalangan siswa. Ini sejalan dengan hasil studi yang menekankan pentingnya metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa selama proses belajar. Diskusi kelompok, debat, dan simulasi kegiatan demokratis tidak hanya memperdalam pemahaman siswa tentang nilai-nilai demokrasi tetapi juga melatih mereka dalam keterampilan berpikir kritis dan komunikasi, yang sangat penting untuk berpartisipasi dalam demokrasi.

Implikasi dari strategi pembelajaran tersebut juga terlihat dalam kegiatan organisasi siswa, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan OSIS (PEMILOS). Kegiatan ini menjadi sarana praktik langsung nilai-nilai demokrasi yang dipelajari dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila

Gambar 2. OSIS sedang melaksanakan voting dalam Pemilos



Sumber: Dokumentasi peneliti

Selain itu, guru menerapkan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning) dengan mengaitkan materi Pendidikan Pancasila dengan pengalaman nyata siswa di lingkungan sekolah. Materi demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dihubungkan dengan kegiatan organisasi siswa seperti rapat OSIS, pemilihan pengurus, dan pelaksanaan program kerja. Strategi ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna (meaningful learning) karena siswa dapat memahami relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini juga dipadukan dengan mindful learning, yang mendorong siswa untuk lebih sadar dan reflektif terhadap sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dan berorganisasi.

Lebih lanjut, melalui keterlibatan tersebut siswa dapat belajar secara langsung mengenai proses demokrasi, seperti menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara musyawarah. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan ruang partisipasi kepada siswa dan menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diinternalisasikan dalam sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan berorganisasi.

Menurut hasil penelitian, strategi pembelajaran yang dipilih guru adalah strategi interaktif. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam beberapa kelompok dan metode interaktif. Ini termasuk terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau pengerjaan tugas berkelompok, serta peserta didik bekerjasama secara berpasangan. Strategi interaktif efektif dalam memunculkan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik. Pembelajaran interaktif merupakan suatu pendekatan yang merujuk pada pandangan konstruktivis dimana pembelajaran interaktif ini menitikberatkan pada pertanyaan peserta didik sebagai ciri setralnya dengan cara menggali pertanyaan-pertanyaan peserta didik.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari (Nisa & Nasiwan, 2018) yang menyatakan bahwa strategi yang sering digunakan yakni strategi pembelajaran interaktif yang berbasis pada aktivitas anak. Karena saat pembelajaran peserta didik lebih sering melakukan diskusi. Diskusi merupakan cara yang tepat untuk menanamkan pendidikan demokrasi kepada peserta didik. Karena saat diskusi peserta didik dilatih untuk menghargai perbedaan pendapat, berpikir kreatif dan dapat aktif atau berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain itu, metode pembelajaran yang dipilih guru bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih kelompok mereka, tetapi terkadang guru sendiri yang membagi peserta didik ke dalam kelompok diskusi.

Dengan demikian, strategi guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila sebagai wahana pendidikan politik sudah berjalan, tetapi efektivitasnya perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih kontekstual, menarik, dan menstimulasi keterlibatan semua siswa secara aktif, bukan hanya sebagian.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari (Rohman, 2020) yang menyatakan bahwa, penerapan metode pembelajaran diskusi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode diskusi pada pembelajaran menghayati budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan interaksi sosial peserta didik. Metode inquiry mendukung aktivitas belajar peserta didik dalam upaya menanamkan nilai-nilai demokratis, sesuai dengan hasil penelitian dari (Sigit, 2019) menyatakan bahwa penerapan metode inkuiri dapat meningkatkan nilai demokrasi peserta didik.

Evaluasi guru dalam mengajarkan Pendidikan Pancasila sebagai wahana Pendidikan Politik

Evaluasi pembelajaran dalam konteks Pendidikan Pancasila sebagai wahana pendidikan politik sangat penting dalam mengetahui keberhasilan proses internalisasi nilai demokrasi dan partisipasi siswa dalam organisasi sekolah. Secara teoritis, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kompetensi kognitif, tetapi juga sebagai alat untuk menilai perkembangan sikap afektif dan keterampilan psikomotorik siswa yang berkaitan dengan demokrasi, seperti kemampuan berpikir kritis, keterampilan menyampaikan pendapat, kemampuan bermusyawarah, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Konsep evaluasi pembelajaran yang komprehensif ini sejalan dengan kajian pendidikan kewarganegaraan yang menyatakan bahwa evaluasi harus mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik agar tercapai tujuan pembelajaran demokrasi secara utuh dan bermakna bagi siswa.

Pendekatan ini dirancang agar siswa tidak hanya memahami politik secara teoritis, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan pengalaman nyata di sekolah dan masyarakat. Melalui diskusi kelompok, kegiatan simulasi, maupun lomba debat, siswa dilatih berpikir kritis, rasional, dan argumentatif. Selain itu, pembelajaran dilengkapi pemahaman tentang nilai historis dan filosofis politik bangsa Indonesia, sehingga siswa menempatkan diri sebagai bagian generasi penerus yang bertanggung jawab menjaga keutuhan demokrasi. Urgensi penguatan pendidikan politik melalui ekstrakurikuler didasarkan pada fungsi sekolah sebagai miniatur masyarakat demokratis. Siswa yang aktif dalam kegiatan organisasi mengenal proses politik sederhana, mulai dari tahap pemilihan ketua, perumusan program, hingga evaluasi bersama. Proses ini efektif dalam menanamkan nilai keterbukaan, musyawarah, dan keadilan sosial (Gobel, Yunus, Mahmud, 2021).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang tergabung dalam organisasi siswa tetapi belum berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan organisasi. Keterlibatan siswa dalam organisasi cenderung bersifat administratif, seperti tercatat sebagai pengurus atau hadir dalam kegiatan, tanpa diikuti kontribusi nyata berupa gagasan, pendapat, atau tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketercapaian materi Pendidikan Pancasila pada aspek psikomotor dan afektif, khususnya keterampilan demokratis, masih belum merata di kalangan siswa.

Dari sisi siswa, keaktifan dalam organisasi juga menunjukkan ketimpangan partisipasi. Kegiatan organisasi sering kali didominasi oleh siswa tertentu yang memiliki keberanian, rasa percaya diri, serta kemampuan komunikasi yang lebih baik. Sementara itu,

sebagian siswa lainnya cenderung bersikap pasif, mengikuti keputusan yang ada tanpa terlibat secara aktif dalam diskusi maupun musyawarah. Hal ini mengindikasikan bahwa sikap demokratis, seperti keberanian menyampaikan pendapat, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan menghargai pandangan orang lain, belum sepenuhnya berkembang secara merata pada seluruh siswa yang tergabung dalam organisasi.

Dalam praktiknya di SMAN 1 Batusangkar, evaluasi yang dilakukan guru Pendidikan Pancasila menunjukkan bahwa evaluasi cenderung bersifat umum dan lebih condong pada pengamatan keaktifan formal siswa dalam pembelajaran dan organisasi, seperti kehadiran, partisipasi administratif, serta keterlibatan fisik dalam berbagai kegiatan sekolah. Pola ini menunjukkan keterbatasan dalam menilai aspek sikap demokratis secara mendalam, karena evaluasi yang efektif seharusnya mampu mengukur sejauh mana siswa mampu menerapkan nilai demokrasi dalam bentuk tindakan nyata, bukan sekadar kehadiran saja. Temuan ini konsisten dengan kritik dalam literatur pendidikan kewarganegaraan yang menunjukkan bahwa tanpa evaluasi yang komprehensif dan terstruktur, indikator evaluasi akan lebih menggambarkan aspek administratif dan kognitif semata, sedangkan perubahan sikap dan perilaku demokratis siswa belum terukur secara signifikan.

Bagi siswa yang masih ragu untuk memberikan pendapat atau berbicara di depan umum, kelompok yang sedang presentasi akan memberikan peluang untuk bertanya. Sebelum memulai pembelajaran dengan metode diskusi, guru akan memberikan penjelasan awal, seperti mendorong siswa agar berpikiran terbuka dan menjelaskan pentingnya berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kebebasan dalam berdemokrasi tidak berarti setiap orang bisa bertindak sesuka hati, tetapi kebebasan tersebut memiliki batasan, karena hak orang lain juga menjadi penghalang (Chamim, 2003:81). Selanjutnya, guru mendorong siswa yang aktif untuk membantu teman-teman mereka yang kurang aktif, sehingga dalam kelas, mereka bisa belajar bersama dan saling memahami. Jika ada perdebatan antara kelompok di kelas, guru akan bertindak sebagai penengah, memberikan penjelasan yang menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Guru juga memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengemukakan pendapat saat pembelajaran, sehingga siswa dapat berlatih berbicara dan merasa lebih percaya diri. Dari tiga solusi yang diberikan untuk mempermudah penerapan strategi demokrasi dalam pendidikan, ada juga cara yang digunakan untuk meningkatkan proses belajar mengajar di kelas melalui metode diskusi.

Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan guru Pendidikan Pancasila di SMAN 1 Batusangkar menunjukkan awal yang baik dalam mengamati partisipasi siswa secara umum, namun masih perlu pengembangan lebih lanjut dalam hal instrumen dan pendekatan evaluatif. Hal ini menjadi penting agar pendidikan politik melalui Pendidikan Pancasila benar-benar mampu mengukur dan memantau perkembangan sikap demokratis dan partisipasi siswa secara komprehensif, bukan hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari dinamika internal siswa sebagai warga sekolah yang aktif, kritis, dan demokratis dalam kehidupan organisasi. Untuk memperbaiki hal ini, sekolah perlu menyusun rubrik evaluasi khusus yang menilai keterampilan demokrasi seperti kemampuan berdiskusi, kerja sama tim, partisipasi aktif dalam musyawarah kelas, dan tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil bersama. Hal ini penting agar evaluasi tak hanya menjadi penilaian administratif, tetapi alat ukur perkembangan sikap demokratis siswa dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai wahana Pendidikan Politik dalam membentuk

sikap demokratis dan meningkatkan partisipasi siswa dalam organisasi di SMAN 1 Batusangkar, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Dari aspek materi pembelajaran, siswa telah memahami konsep dasar demokrasi seperti musyawarah, toleransi, serta hak dan kewajiban warga negara. Namun, pemahaman tersebut masih dominan pada ranah kognitif dan belum sepenuhnya terwujud dalam perilaku nyata, terutama dalam keberanian menyampaikan pendapat dan keterlibatan aktif dalam organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Kerr (1999) yang menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan proses persiapan siswa untuk menjalankan peran sebagai warga negara, yang tidak hanya menuntut pemahaman, tetapi juga praktik nyata.

Dari aspek strategi pembelajaran, guru telah menerapkan strategi interaktif dan kontekstual seperti diskusi, debat, simulasi, serta keterlibatan dalam kegiatan demokratis seperti PEMILOS. Strategi ini terbukti efektif dalam membantu siswa memahami sekaligus mengalami praktik demokrasi secara langsung (Setiawati et al., 2024). Selain itu, pendekatan pembelajaran interaktif berbasis partisipasi aktif juga terbukti mampu meningkatkan pemahaman demokrasi serta keterampilan berpikir kritis dan komunikasi siswa (Smith, 2015; Nisa & Nasiwan, 2018). Hal ini didukung oleh teori pembelajaran sosial Vygotsky (1978) yang menekankan pentingnya interaksi dalam proses belajar. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan partisipasi antar siswa yang menunjukkan bahwa strategi tersebut belum menjangkau seluruh siswa secara merata.

Dari aspek evaluasi pembelajaran, penilaian yang dilakukan guru masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mengukur aspek afektif dan psikomotorik, seperti kemampuan berargumentasi, berpikir kritis, serta partisipasi dalam musyawarah. Padahal, evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk mengukur internalisasi nilai demokrasi secara nyata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gobel, Yunus, dan Mahmud (2021) yang menegaskan bahwa pengalaman langsung dalam organisasi merupakan sarana efektif dalam membentuk sikap demokratis siswa. Selain itu, penggunaan metode diskusi dan inkuiri juga terbukti dapat meningkatkan nilai demokrasi serta interaksi sosial siswa (Rohman, 2020; Sigit, 2019).

Secara keseluruhan, Pendidikan Pancasila telah berjalan sebagai sarana pendidikan politik, tetapi belum optimal dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi secara menyeluruh. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan politik tidak hanya ditentukan oleh penyampaian materi, tetapi juga oleh konsistensi penerapan nilai-nilai demokrasi dalam budaya sekolah secara keseluruhan. Lingkungan sekolah yang mendukung, peran guru sebagai fasilitator yang demokratis, serta keterlibatan aktif siswa dalam organisasi menjadi faktor kunci dalam memperkuat internalisasi nilai tersebut. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila diharapkan mampu membentuk siswa tidak hanya sebagai individu yang memahami demokrasi, tetapi juga sebagai subjek demokrasi yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, L. P. S. (2020). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membangun karakter siswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 45–53.
- Chamim, A. I. (2003). *Pendidikan kewarganegaraan menuju kehidupan demokratis*. Yogyakarta: LP3 UMY.

- Ditjen Dikti. (2016). Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Gobel, S., Yunus, R., & Mahmud, A. (2021). Penguatan pendidikan politik melalui kegiatan organisasi siswa di sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 45–54.
- Hamisa, W., & Murdiyono, M. (2018). Peran PKn sebagai pendidikan politik dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi di SMA. *Jurnal Civics*, 15(1), 1–10.
- Ibda, H. (2012). Pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(2), 89–98.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education: An international comparison*. London: Qualifications and Curriculum Authority (QCA).
- Margono. (2012). Pendidikan Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter bangsa. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nisa, K., & Nasiwan. (2018). Implementasi pembelajaran interaktif dalam menanamkan nilai demokrasi pada peserta didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 112–120.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila sebagai upaya membentuk karakter siswa. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 6349–6356.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Rohman, A. (2020). Penerapan metode diskusi dalam meningkatkan nilai demokrasi siswa. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(1), 33–41
- Setiawati, E., dkk. (2024). Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 15–25.
- Shalihudin, F., & Hermanto, F. (2021). Peran pendidikan politik dalam membangun sikap demokratis siswa melalui organisasi siswa intra sekolah di SMP Negeri 22 Semarang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 120–130.
- Sigit, D. (2019). Penerapan metode inkuiri dalam meningkatkan sikap demokratis siswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 78–86.
- Sinaga, A., dkk. (2024). Peran Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan*, 10(1), 55–64.
- Smith, A. (2015). *Teaching democracy through active learning strategies*. New York: Routledge.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Winarno. (2013). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuana, W., & Triwahyuningsih, D. (2014). Partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS di SMK Diponegoro Banyuputih Batang Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 1–8